

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
SEJARAH OLEH DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIAK TAHUN 2012-2014**

YOPHI SALRAHMANDA

Email : Yophisalrahmanda@yahoo.co.id

Pembimbing : Dr. Ali Yusri, MS.

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study was conducted to explain the implementation of the Tourism Development Policy made the Department of Tourism in particular Siak district government policies regarding Local Regulation No. 12 Year 2012 on Tourism Development Master Plan In Siak. As for the background of this research is the implementation of the policy has not been well. This study uses the theory of public policy implementation that emphasizes the approach of George Edward III in order to explain the phenomena encountered in the field. This study used qualitative methods, while the technique of data collection using interviews, observation and discussion with sources of research. Furthermore, the data in the form of data qualitative and quantitative data were analyzed with descriptive technical data analysis.

The results showed that the actors implementing the policy has not been able to implement the policy properly due to lack of human resources who are competent in doing development. In addition, the lack of historical attractions that can be enjoyed as long as the government through the Department of Tourism only do maintenance to historic buildings not do more development to improve the quality of the attraction. Coupled with the lack of tourist facilities in Siak Regency as a souvenir sales. So that this condition makes tourism Siak can not be a reliable sector becomes self Siak.

The results also indicate that the scope of the social interaction between communities, employers and the government has not been established. This of course have an impact on the political sphere public support for the policy. While the economic sphere also no significant effect on the increase in local revenues and increase social welfare.

Keywords: history Tourism and Policy Implementation

PENDAHULUAN

Kabupaten Siak merupakan wilayah yang kaya akan potensi alam, nilai sejarah, seni dan budaya, serta memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian sejarah, seni dan budaya melayu, serta pembangunan ekonomi lokal. Tapi sayangnya beragam potensi pariwisata tersebut belum semuanya dapat tergarap secara maksimal, padahal dengan melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Siak selain potensi alam yang berupa migas Kabupaten Siak juga memiliki potensi pariwisata sejarah yang berupa kekhasan serta keunikan dari peninggalan sejarah seperti bangunan dan budaya, menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Siak memang khas dan unik.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk melestarikan keaslian budaya dan nilai sejarah yang ada, maka Kabupaten Siak mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang rencana induk pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak, dengan menimbang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah :

- a. tujuan khusus adalah memberikan arahan agar upaya pengembangan kepariwisataan dapat menjadi sektor andalan bagi daerah Kabupaten Siak, sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat baik ekonomi maupun sosial budaya; dan
- b. tujuan umum adalah memberikan arahan bagi pengembangan ekonomi dan sosial budaya Daerah Kabupaten Siak, dalam

menjawab tantangan zaman sehingga dapat mengantarkan Kabupaten Siak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan Melayu sesuai dengan visi Kabupaten Siak.

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dimana pariwisata, seni, budaya, dan Olahraga dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora). Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah melakukan pengembangan dan pembangunan urusan pariwisata, seni, budaya, pemuda dan olahraga.

Berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Siak dari tahun 2011-2013 jumlah kunjungan tersebut belumlah memuaskan. Tentu permasalahan ini disebabkan karena belum terbenahnya permasalahan dan tertatanya sarana serta prasarana objek wisata yang ada di Kabupaten Siak, kemudian masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pariwisata yang mengakibatkan daya saing pariwisata Kabupaten Siak masih rendah, pemasaran pariwisata yang belum tepat sasaran terhadap peningkatan kunjungan, serta fasilitas penunjang kepariwisataan di Kabupaten Siak yang belum memadai.

Menurut Riant Nugroho Dwijowijoto (2003:158), maka pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Setiap tindakan dan kebijakan yang mengenai kehidupan masyarakat

banyak, baik secara prosedural maupun normatif harus melibatkan segenap unsur kekuatan yang berada pada masyarakat itu sendiri demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Seharusnya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Siak akan keragaman potensi objek wisata yang ada, Siak memiliki prospek yang menjanjikan dalam pengembangan pariwisata. Dalam arti, produk wisata yang beragam merupakan sebuah potensi dalam pemasaran secara luas dan menentukan segmentasi pasar wisata sehingga wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Siak bisa meningkat.

Kerangka Teoritis

Kebijakan

Menurut Dunn (2001:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikator dalam perumusan kebijakan ini adalah :

- a. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan sesuatu keputusan.
- b. Penerapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan.

- e. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan.

Dengan demikian dapat juga diketahui bahwa menurut Nugroho (2008,115) terhadap tiga kegiatan pokok dalam kebijakan publik yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan
- b. Implementasi Kebijakan
- c. Evaluasi Kebijakan

Selain itu Nugroho (2008:149) juga menyatakan bahwa kebijakan mempunyai enam kriteria utama yaitu:

- a. Efektifitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Kelayakan.

Implementasi Kebijakan

Edwards III (dalam Sujianto, 2008:38) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:

a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (Policy Implementors).

b. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2008:41) mengemukakan bahwa Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia,

anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sumber Daya Manusia (Staff)
- 2) Anggaran (Budgetary)
- 3) Fasilitas (Facility)
- 4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

c. Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam masa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Adapun pertimbangan pemilihan tempat penelitian tersebut adalah kesesuaian objek penelitian dan lokasi penelitian, serta kemudahan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan sektor pariwisata sejarah di Kabupaten Siak.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif yaitu yang bertujuan menggambarkan dan memahami secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena serta gejala yang diteliti yang berhubungan dengan realita dilapangan berdasarkan data atau informasi yang ada.

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif dan pengolahan data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Sejarah Oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak, dimana pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan upaya pengembangan ataupun promosi yang dilakukan untuk memasarkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Siak. Akan tetapi pengembangan yang dilakukan dalam membangun destinasi pariwisata belumlah maksimal sehingga pengembangan yang telah dilakukan masih dalam skala dan jumlah terbatas.

Objek wisata yang ada di Kabupaten Siak adalah inventarisasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Akan tetapi dari semua objek pariwisata sejarah yang ada di Kabupaten Siak hanya beberapa objek wisata yang baru dikembangkan oleh pemerintah daerah, salah satunya yaitu Istana Siak. Sementara itu menyangkut soal pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Siak yang bertanggung jawab yaitu Disparpora Kabupaten Siak, berikut diuraikan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 53 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan

tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak, yaitu dengan melalui promosi dan melakukan berbagai iven yang telah dijadikan kegiatan tahunan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Upaya dalam pengembangan potensi wisata di Kabupaten Siak selama ini belum maksimal dan menyeluruh, akibatnya keberadaan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Siak belum dapat dinikmati. Biarpun dalam berbagai hal masih banyak kekurangan, perkembangan kegiatan pariwisata tersebut selama ini sedikit banyak telah mendorong perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Perencanaan yang terpadu untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan kepariwisataan yang cenderung bergerak cepat perlu didasari oleh data, keterangan dan fakta yang kuat seperti keindahan, kelestarian, pasar dan keseimbangan antara keaslian kawasan dengan penambahan fasilitas baru yang sesuai konteks.

Mewujudkan konsep perencanaan yang terpadu terhadap potensi-potensi pariwisata yang ada

serta tidak terbatasnya pada rencana yang bersifat konseptual, maka inventarisasi potensi pariwisata di Kabupaten Siak perlu dilakukan secara cermat dan teliti dengan pembahasan yang detail, mendalam dan bersifat operasional serta mencakup permasalahan yang bersifat teknis dengan pendekatan multi disiplin, multipersonal dan multidimensi sehingga pada akhirnya kualitas kawasan dan objek-objek wisata di dalamnya dapat ditingkatkan.

Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga telah melakukan banyak hal, terbukti dengan terbinanya dua desa wisata yang telah terbentuk dari tahun 2012 dan diharapkan desa tersebut dapat memotivasi masyarakat akan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Siak.

Dalam strategi pengembangan pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan pemerintah, swasta, masyarakat, serta kelompok khusus yang memiliki kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasikan seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai promosi yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata Kabupaten Siak bentuk program tersebut adalah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata dengan mempromosikan potensi-potensi objek wisata dan budaya dalam bentuk media, sehingga masyarakat lokal maupun mancanegara dapat mengetahui informasi akan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Siak.

Adapun pembangunan gedung pasar seni yang dilakukan oleh Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk mempermudah para pengrajin menjajahkan hasil karyanya sebagai oleh-oleh bagi wisatawan, pembangunan ini dimulai pada tahun 2013-2014. Pemerintah daerah berharap gedung pasar seni tersebut berada sangat strategis di Kabupaten Siak, yang berada di tengah kota dan berada dekat dengan kompleks Istana Siak. Pembangunan pasar seni ini juga diharapkan dapat membangkitkan semangat para pengrajin untuk dapat berkarya dan meningkatkan kualitas produk kerajinan yang layak saing. Pasar seni tersebut juga memberikan kemudahan untuk wisatawan mendapatkan informasi akan pariwisata di Kabupaten Siak.

Bentuk pembangunan fasilitas pariwisata di Kabupaten Siak telah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Siak berharap potensi pariwisata sejaraha di Kabupaten Siak dapat bersaing di dunia pariwisata. Dalam pembangunan prasarana pariwisata ini diharapkan dapat meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, dan sebagainya, yang tentu saja dapat meningkatkan

kesempatan masyarakat untuk mengambil peluang.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Siak

Dalam mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu darahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif.

Berdasarkan teori implementasi faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan menaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan. Dalam konteks pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak yang menjadi kekuatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan program kerja sebagai berikut:

a. Potensi Pariwisata Untuk Menggantikan Potensi Alam Sebagai Potensi Andalan

Kabupaten Siak termasuk salah satu daerah penghasil minyak di Indonesia, Kabupaten Siak setiap tahunnya mendapatkan dana perimbangan yang relatif besar, besarnya dana perimbangan yang diterima membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Siak termasuk terbesar kedua di Riau setelah Kabupaten Bengkalis.

Ketergantungan dana pembangunan daerah kepada dana perimbangan sifatnya tidaklah tetap karena cadangan minyak yang dimiliki Kabupaten Siak tidaklah dapat bertahan dalam jangka waktu lama, lifting minyak bumi yang dihasilkan dari perut bumi Kabupaten Siak cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, untuk itu dalam perencanaan jangka panjang perlu kiranya difikirkan adanya alternatif lain selain minyak bumi yang dapat menjadi andalan baru pemasok dana bagi daerah pembangunan daerah.

Salah satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Siak adalah potensi di sektor pariwisata. Sebagai daerah bekas pusat pemerintahan kerajaan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak memiliki benda peninggalan sejarah yang bernilai tinggi peninggalan Kerajaan siak, seperti Istana, masjid, berbagai benda pusaka serta berbagai produk budaya melayu yang tetap bertahan hingga saat ini. Keberadaan benda peninggalan sejarah dan budaya tersebut akan bernilai ekonomi jika dikelola secara baik sebagai daerah tujuan wisata budaya dan sejarah.

Sebagai potensi yang diharapkan dapat menggantikan

potensi alam, sektor pariwisata sangat memberikan dampak yang baik bagi setiap masyarakat, yang mana sektor ini secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga memberikan pemasukkan daerah yang besar. Harapan ini tidaklah menjadi angan-angan saja bagi pemerintah Kabupaten Siak, segala upaya yang dilakukan telah dijalankan hanya bagaimana cara pemerintah menyajikan pariwisata untuk dapat dinikmati dengan baik sehingga wisatawan dapat menikmati budaya dan seni yang dimiliki oleh Kabupaten Siak.

Kedepannya, seiring dengan semakin kurangnya kandungan atau cadangan minyak bumi yang dimiliki oleh Kabupaten Siak, maka kehadiran sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi primadona baru bagi perolehan dana pembangunan daerah, Kabupaten Siak memiliki banyak objek wisata mulai dari wisata sejarah dan budaya, wisata alam, wisata bahari dan wisata kuliner. Merespon kondisi tersebut maka kebijakan pengembangan sektor pariwisata menjadi sebuah keharusan, sebelum kebijakan tersebut diformulasikan, maka pemetaan dan identifikasi terhadap berbagai potensi objek wisata haruslah dilakukan. Berikut inventarisasi potensi pariwisata sebagai alternatif peningkatan perekonomian daerah Kabupaten

b. Potensi Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat.

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam Pembangunan Perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam dua (2) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan

ekonomi bangsa-bangsa didunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya kebelahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi ditingkat masyarakat lokal.

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Siak merupakan salah satu peluang dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan pariwisata diharapkan mampu memotivasi masyarakat lokal untuk mengambil peluang sehingga perputaran ekonomi dapat lebih cepat terutama meningkatkan pelaku usaha wisata, industri kecil, dan masyarakat di daerah pada umumnya. Berjalannya kegiatan pariwisata diharapkan akan meningkatkan kerja, peluang usaha dan peningkatan pendapatan, dan juga pelestarian lingkungan, melalui kesempatan tujuan ini diharapkan akan mengurangi laju kemiskinan masyarakat dan disisi lain akan tercapai peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah.

c. Kelembagaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Otonomi daerah memberikan otoritas kepada pemerintah setempat untuk menggali potensi daerahnya. Pariwisata menjadi potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Siak.

Kelembagaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berperan besar dalam menggali potensi pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Inisiatif daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan konteks kebutuhan daerahnya. Seperti kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata Kabupaten Siak dan menjadikan Kabupaten Siak sebagai daerah tujuan wisata di Provinsi Riau.

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Siak dan keberadaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga memegang peran penting, terutama dalam melakukan segala kegiatan yang bertujuan guna memberitahukan atau mempromosikan pada pihak luar bahwasanya Kabupaten Karimun memiliki potensi pariwisata. Pemerintah hendaknya berbenah terlebih dahulu mengenai pengembangan dan pengelolaan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Siak.

Hadirnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memungkinkan untuk bisa mengembangkan pariwisata dengan lebih baik, meski dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki serta dana yang harus dikeluarkan. Dengan komitmen Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan pariwisata yaitu dengan mengupayakan menampilkan seni dan budaya setiap bulannya. karena untuk mendongkrak jumlah kunjungan, Dinas Pariwisata sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata mengupayakan penampilan seni budaya ini untuk dapat ditampilkan

secara berkesinambungan kepada khalayak ramai.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan sumber daya manusia di dalam dinas memang sebagai salah satu kendala dalam pengembangan pariwisata dan Dinas pariwisata memang sangat membutuhkan penambahan sumberdaya yang ahli dalam mengembangkan pariwisata.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi, sehingga seringkali membuat suatu implementasi tidak dapat mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaan kebijakan program pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengalami hambatan yang akan diuraikan lebih lanjut. Maka penulis melihat ketidakmaksimalnya upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan 4 variabel penunjang keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Sebagaimana dalam implementasi kebijakan yang mana komunikasi sebagai salah satu variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (Transimisi), kejelasan informasi (Clarity) dan konsistensi informasi (Consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada

kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Berdasarkan dengan data lapangan yang diperoleh oleh penulis, bahwasanya penulis mendapati adanya komunikasi yang kurang efektif antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan masyarakat terhadap upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak. Seharusnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata dapat membawa masyarakat untuk ikut mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada.

Komunikasi yang dimaksud dalam implementasi kebijakan ini, bahwa Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak sebagai instansi yang mengemban tugas sebagai perumusan kebijakan harus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak swasta maupun masyarakat lokal guna menginformasikan apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kebijakan yang dihasilkan. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh oleh penulis, bahwasanya kurangnya komunikasi yang intens antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kepada pihak swasta dan masyarakat mengenai upaya pengembangan pariwisata.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, bahwa pernyataan di atas menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tidak pernah melakukan komunikasi maupun sosialisasi terhadap swasta maupun masyarakat sekitar untuk melakukan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Siak. Akan tetapi selama ini bentuk komunikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata hanyalah berbentuk pemberitahuan kegiatan ataupun even baik dari pentas seni maupun acara olahraga seperti Tour de Siak.

b. Sumberdaya

Sumberdaya juga mempunyai peran dalam menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan, bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaiannya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Berikut uraian dari berbagai bentuk sumber daya yang mendukung dalam sebuah kebijakan:

1. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Dengan melihat hal ini, bahwa perlu adanya sosialisasi yang lebih maksimal guna meningkatkan sumber daya manusia baik itu pada masyarakat maupun implementator. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pemerintahan yang mempunyai keterkaitan dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata tidak maksimal dalam menjalankan upaya pengembangan pariwisata yang dapat dilihat pada jumlah objek wisata yang minim untuk dinikmati. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat dan implementator.

2. Anggaran

Adapun anggaran dari APBD untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dan juga untuk pengelolaan serta pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Siak yang sudah di anggarkan didalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Jumlah anggaran yang besar tersebut seharusnya dapat meningkatkan kualitas pariwisata yang ada di Kabupaten Siak, akan tetapi kontribusi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pemasukan daerah tidak sebanding dengan anggaran yang begitu besar tiap tahunnya dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Siak.

3. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan

fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Selain tenaga kerja yang dimiliki haruslah kompeten, sarana dan prasarana untuk menunjang kerja haruslah diperhatikan.

Selain fasilitas internal Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak yang berupa fasilitas perkantoran, fasilitas di objek wisata juga minim

Kurangnya fasilitas yang ada di objek wisata sangatlah berpengaruh terhadap jumlah kunjungan, untuk menjadikan suatu daerah tujuan wisata tugas yang paling penting yaitu memfasilitasi objek wisata beserta sarana dan prasarana untuk memanjakan wisatawan. Apabila fasilitas sudah terpenuhi, sudah jelas wisatawan akan meningkat dan memberikan kontribusi yang baik terhadap pemasukan daerah.

4. Informasi dan Kewenangan

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Kurangnya informasi tentang pentingnya cara pengelolaan potensi pariwisata oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menjadikan kurangnya upaya dalam menjalankan tugas dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata, hal ini dapat dilihat dari berbagai objek wisata yang ada di Kabupaten Siak, hanya beberapa yang dapat di kembangkan dan dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan warga setempat bahwa penyalahgunaan tempat bersejarah oleh anak-anak muda menjadi salah satu permasalahan dan ini dapat menjadikan objek wisata rusak dari nilai budaya, karena wisata kolam hijau adalah tempat para sultan mencuci pedang pusaka perangnya. Dengan melihat permasalahan ini selaku Dinas yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata haruslah melakukan pengawasan sehingga tempat tersebut tidak menjadi tongkrongan anak-anak muda yang menjalin asmara.

Melihat bentuk pengawasan atas kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak sangatlah minim dan bentuk informasi yang disampaikan kepada masyarakat sekitar kurang optimal, sehingga permasalahan akan penyalahgunaan objek wisata terjadi dan ini dapat membuat nilai dari budaya akan objek wisata juga menurun dan bentuk keasrian dari objek wisata juga menurun.

c. Disposisi

Disposisi juga mempunyai peran penting dalam penentu keberhasilan implementasi kebijakan. bahwa disposisi merupakan kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan

tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Menurut data yang diperoleh oleh penulis, bahwasanya dapat dilihat instansi pemerintahan yang berkecimpung pada upaya pengembangan pariwisata kurang berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan yang menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor andalan dan menjadikan sektor pariwisata menjadi penggerak ekonomi rakyat. Dengan melihat fenomena yang ada di Kabupaten Siak bahwa pariwisata belum melekat kepada masyarakat sehingga pemanfaatan di bidang pariwisata belum bisa diambil oleh masyarakat.

Dengan berlatarbelakangi visi misi Kabupaten dan visi misi Dinas Pariwisata untuk menjadikan pariwisata sebagai potensi andalan dan menjadikan pariwisata menjadi penggerak ekonomi kerakyatan maka implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan dan masyarakat sebagai tujuan sebenarnya dari kebijakan juga belum tersentuh dengan maksimal.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama

adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Melihat permasalahan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Siak bahwa Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga memiliki struktur birokrasi yang baik, yang mana untuk mengembangkan pariwisata Dinas Pariwisata memiliki *standart operation procedur* (SOP) dan berlandaskan RENSTRA untuk melakukan kinerja dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Siak. Akan tetapi tenaga kerja yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tidaklah semuanya Profesional di karenakan pariwisata seharusnya di kelola oleh orang-orang yang paham dari permasalahan yang di alami oleh Kabupaten Siak, sehingga struktur yang telah disusun dan orang-orang yang menduduki jabatan tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Siak yang merujuk pada pedoman pengembangan sektor pariwisata pada

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Siak dan di Implementasikan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai Implementator dalam bidang Pariwisata. Berikut uraian kesimpulan yang dibuat penulis berdasarkan uraian dan analisis pada bab pembahasan hasil penelitian di atas :

1. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak masih memadukan pariwisata dengan even olahraga, sehingga objek pariwisata yang ada di Kabupaten Siak belum sepenuhnya menjadi sorotan andalan.
2. Pengembangan pariwisata sejarah yang ada di Kabupaten Siak selama ini tidak berkembang dikarenakan pengelolaan objek wisata masih dilakukan sendiri oleh Dinas pariwisata, pemerintah belum melibatkan masyarakat untuk mengelola objek wisata. Sehingga objek wisata sejarah hanya terfokus kepada kompleks istana saja sebagai sektor andalan.
3. Dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten siak, pemerintah kurang memfasilitasi objek wisata dengan pasar souvenir, akomodasi hotel, papan informasi objek wisata sebagai dayatarik wisatawan.
4. Adapun empat faktor kendala yang di alami Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, faktor tersebut yaitu : pertama komunikasi yang mana kurangnya komunikasi ataupun sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat khususnya pengrajin untuk meningkatkan kualitas produksi, kedua sumberdaya, keterbatasan sumberdaya yang mencakup disini

memiliki beberapa faktor yaitu sumberdaya manusia, fasilitas, informasi dan kewenangan, ketiga disposisi, sikap dari pelaku kebijakan yaitu pemerintah belumlah terlihat serius dalam pengembangan pariwisata, sehingga sikap pemerintah yang kurang serius tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat yang tidak mau memanfaatkan potensi pariwisata, keempat struktur birokrasi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki struktur birokrasi yang baik yang standar SOP, akan tetapi orang-orang yang menjabat di dalam struktur tersebut tidaklah orang-orang yang profesional dalam bidang pariwisata dikarenakan tidak ada alumni khusus pariwisata yang menduduki jabatan tersebut.

Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh Pemerintah ataupun dinas terkait dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak seharusnya dapat lebih mengembangkan seluruh objek wisata sejarah yang ada di Kabupaten Siak, sehingga objek wisata yang dapat dinikmati di Kabupaten Siak tidak hanya Komplek Kerajaan Istana Siak saja.
2. Pemerintah seharusnya dapat memfasilitasi objek wisata dengan pasar souvenir sehingga dapat menjadi tempat daya tarik

wisatawan untuk berkunjung dan mendapatkan cindramata yang menjadi khas Kabupaten Siak.

3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak hendaknya melaksanakan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan pengembangan sektor pariwisata yang ada seperti : (Travel Tour, media cetak maupun media elektronik, tokoh masyarakat, pihak hotel dan pengusaha setempat.)
4. Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan arahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan program pengembangan pariwisata sejarah yang ada di Kabupaten Siak, sehingga Kabupaten Siak tetap dikenal sebagai kota Istana dengan berbagai fakta kesejarahannya

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Budiardjo M, 2008. Dasar-dasar ilmu politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Islamy, M. Irfan, 2001. Prinsip-prinsip Kebijakan Negara, Jakarta: BumiAksara.
- Nugroho, Adi, 2008. Kebijakan Publik, Jakarta: Studi Press
- Sujianto, Drs. M.Si. Ph.D, 2008. Implementasi Kebijakan Publik, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Suyanto, Sutinah, 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Kencana.
- Tangkalisan, Hersel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik yang

- Membumi, Jakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
- Waluyo, 1994. Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Pariwisata. (Studi Kasus Di Daerah Riau Kepulauan Propinsi Riau), Jakarta: Depdikbud.
- William Dunn, 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- ,1998. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo Joko, 2001. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: InsanCendekia.
- Skripsi;**
- Fakhrurrazi. 2014. Peranan Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Putih Desa Tilang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2010-2012. Universitas Riau.
- Idham Asyhuri, Program Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus di Kecamatan XIII Kota Kampar, 2008.
- Nina Fadhilla Shannaz, Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Daerah Di Kota Pekanbaru, 2009.
- Sihar Oloan Naibaho, Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dalam Memasarkan Objek Wisata di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009- 2011.
- Peraturan Perundang-Undangan;**
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang otonomi daerah dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang No.24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Siak Sri Indrapura.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak.
- Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 53 Tahun 2012 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Siak.
- Sumber Lain;**
- <http://siaksatu.com/mobile/detailberita/4776/2013/12/04/-bupati-tekankan-pentingnya-potensi-wisata-siak- akses 27 -07-2014>
- <http://www.riaueditor.com/mobile/?open=content&id=9576 akses - 5-2014>
- <http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis- implementasi-kebijakan- publik/ akses -5-2014>